

**PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

**(Analisis putusan MK no.1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU
no.4 Tahun 2014)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :
TOLIB AGUS PUTRA
NPM : 1421020228
Program Studi : Siyasah**



**JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/2019M**

ABSTRAK

Oleh

Tolib Agus Putra

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2013 tentang MK kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK demi menjaga dan mengangkat kembali kewibawaan serta kehormatan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Menguji Undang-Undang baik secara formil maupun materil merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Ada beberapa hal yang perlu disorot/pandang untuk dapat melakukan tindakan prefentif .

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK dan Bagaimana tinjauan atau analisis fiqh siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai analisis fiqh siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU no. 4 Tahun 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehknik dokumentasi dengan mencari data mengenai mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.4 Tahun 2014 tentang MK, catatan, buku, dan sebagainya. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode Analisa kualitatif menggunakan pola deduktif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut. Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan terutama dalam hal kontrol eksternal masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

J. E. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Pasca Putusan MK NO.1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014)

Nama : TOLIB AGUS PUTRA

NPM : 1421020228


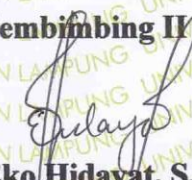
Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. **Eko Hidayat, S.Sos, M.H.**

NIP. 1962201111994031001 **NIP. 197512302003121002**

Ketua Jurusan



Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

NIP. 195808171993031002

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Il. H. Endro Supriatin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah
 Konstitusi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Pasca Putusan MK No.
 12/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014)
 oleh **Tolib Agus Putra NPM 1421020228** Jurusan Siyasah,
 telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan
 Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.** (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
 101.19709901.997031002

v

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)*



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya tercinta yakni, Ayahanda Ali Imron dan Ibunda Poninten yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.



RIWAYAT HIDUP

Tolib Agus Putra, lahir pada tanggal 17 Agustus 1991 di Karang Anyar sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Ali Imron dan Ibu Poninten. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Karang Anyar, tahun 1997-2003.
2. SMP Amal Bhakti, tahun 2003-2006
3. SMA Pangundi Luhur Bandar Lampung, tahun 2006-2009
4. UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Siyasah tahun 2014

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum penulis menyusun Skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Pasca Putusan MK NO. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014)”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Pasca Putusan MK NO. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014) dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- a. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- b. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
- c. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
- d. Dr.Drs.H.M.Wagianto,SH.,MH. dan Eko Hidayat,S.SOS.,MAH. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.

- e. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
- f. Ayahanda Ali Imron dan Ibunda Poninten yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- g. Teman seperjuangan Siyasah yang telah memberikan pengalaman dan banyak kenangan selama ini.
- h. Para sahabat dan teman seperjuangan KKN yang memberikan semangat dan dukungan serta yang mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, Februaari 2019

Penulis,

Tolib Agus Putra
NPM. 1421020228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Pasca Putusan Mk No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014)”** dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Diantara beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan adalah :

1. **Pengawasan** yaitu penilikan, penjagaan, atau pengarahan suatu kebijakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenar-benarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Yang dimaksud ialah cara berkerjanya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.
- Uuuuu
2. **Hakim** yaitu orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).

3. **Mahkamah Konstitusi**, yaitu suatu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

4. **Analisis** yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

5. **Fiqih Siyasah**

a. **Fiqih** yaitu suatu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan.

b. **Siyasah** secara etimologis yaitu berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Disamping arti tersebut siyasah juga berarti politik dan penetapan bentuk kebijakan.

Fiqih Siyasah merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²

6. **Mekanisme** yaitu cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).³

¹ Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), h.61

²Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), h. 95

³Reka Miswanto, *Kamus Pintar Perkuliahan*, (Surabaya: Gemilang, 2017), h. 49

7. **Pasca putusan** yaitu setelah, sesudah, bakda,⁴ putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.
8. **Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.4 tahun 2014**, yaitu tentang pengujian undang-undang No.4 tahun 2014 tentang penetapan perppu No.1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasca putusan ini yaitu bahwa hakim mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya, yaitu:
 - a. Undang-Undang No.4 tahun 2014 tentang penetapan perppu No.1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

⁴*Ibid.*, h.580.

Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian, untuk mengkaji lebih dalam mengenai “MEKANISME PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MK NO. 1,2/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 4 TAHUN 2014”

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara No. 1,2/PUU-XII/2014. Jakarta. 2014

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyash serta terjadinya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kenegaraan menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak memunyai konstitusi. Inggris sekalipun yang sering dijadikan sebagai contoh negara tanpa konstitusi pada prinsipnya mengakui dan mempraktikkan ketatanegaraannya dengan konstitusi, meskipun bentuknya tidak sebagaimana Undang-Undang Dasar pada umumnya yang tertulis. A.A.H. Struycken menyebutkan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang didalamnya memuat *Pertama*, Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; *Kedua*, Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; *Ketiga*, Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan *Keempat*, Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Amandemen UUD 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 yang mendasar tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar”. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dibatasi oleh kesepakatan bersama yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.⁶

Sedangkan politik hukum dan kekuasaan berkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan, dan hukum sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik Undang-Undang ataupun instrumen politik lainnya mempunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang dan menguasai lembaga politik. Undang-Undang sebagai sumber legalistik yang berfungsi bingkai bagi penguasa mempertahankan kekuasaan merupakan ciri produk politik otoritarian, represif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, kontekstualisasi produk demikian menjadi pembeda dari *Lord Action* bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Unsur-unsur politik hukum dimaksud meliputi;

⁶Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 78

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷

Dahulu Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Namun wewenang tersebut dilakukan judicial review oleh MK sendiri, sebanyak dua kali. Sehingga sekarang Hakim Konstitusi tidak ada lembaga pengawasnya, berbeda dengan hakim di tingkat peradilan lain. Pengawasan merupakan unsur penting dan menentukan dalam organisasi untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan sesuai dengan visi dan misinya.

Penerapan konsep independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh absolut alias harus diletakkan dalam konteks akuntabilitas (tidak bebas mutlak dan harus tetap dipertanggung jawabkan). Untuk mencapai hasil yang ideal, maka dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas dan sistem pengawasannya tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga *independency of judiciary* (kekuasaan kehakiman yang merdeka/mandiri). Melalui mekanisme pengawasan kelembagaan bersifat intern dan ektern yang kuat bisa menjadi solusi.

Pengawasan diperlukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan performa kelembagaan yang lebih baik. Mekanisme pengawasan harus

⁷Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9

dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*). Mekanisme pengawasan pertama dilakukan oleh internal dalam tubuh organisasi MK, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dalam organisasi yakni Komisi Yudisial sebagai wadah di luar organisasi, dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

Melihat kondisi tersebut masyarakat mulai resah akan kinerja hakim MK yang berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap lembaga negara Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan menafsirkan konstitusi, lembaga yang bertugas mengawal dan menafsirkan konstitusi justru malah melanggar konstitusi. Hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2013 tentang MK kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK demi menjaga dan mengangkat kembali kewibawaan

⁸Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru: *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), 5-6.

serta kehormatan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Pengujian Undang-Undang No.4 tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 pertama kali diajukan oleh Andi Muhammad Asrun, Heru Widodo dan Samsul Huda, pengujian Undang-Undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangan ini diatur dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian kepada Undang-Undang baik materiil maupun formil atas suatu Undang-Undang. Menguji Undang-Undang baik secara formil maupun materiil merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Jika melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus yang menghebohkan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disorot/pandang betul untuk dapat melakukan tindakan prefentif supaya kasus seperti Akil Mochtar tidak terulang lagi kepada hakim-hakim yang lain, yang pertama ialah mengenai penerimaan hakim MK yang sangat selektif dan yang kedua ialah sistem pengawasan terhadap hakim MK yang dilakukan secara intens dan ketat.

Sebenarnya, apabila menilik pada proses perdebatan dalam Perubahan UUD 1945, ada empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pertama, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁹ Kedua, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan

⁹Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 145

yang terkait dengan itu. Ketiga, perlunya pengawasan terhadap hakim. Terakhir, perlunya penerapan judicial review.

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa. :¹⁰

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah

¹⁰Said “Fungsi Pengawasan Dalam Islam”,
<http://saidiqbal.blogspot.com/2012/01/fungsipengawasan-dalam-Islam.html>, diakses pada 27 April 2018.

didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat¹¹. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Pasca Putusan Mk No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014)”**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK?
2. Bagaimana tinjauan atau analisis fiqh siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai analisis fiqih siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU no. 4 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan (referensi) bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia tentang mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU no. 4 Tahun 2014 dan juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk kedalam penelitian (*library research*). Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya dinamakan data primer.

Dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka (*Library Research*) yang dinamakan data sekunder (data dasar).¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan yuridis normatif, yaitu “Suatu metode yang dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses internet yang berkaitan dengan mekanisme

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 24

¹³Kaelan, MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma, 2005). h. 58.

pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.

Studi ini merupakan kajian pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian, ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya: Data tentang mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi menurut UU No.4 Tahun 2014 tentang MK.

- i. Data tentang putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 pengujian UU No. Tahun 2014 tentang MK, berupa amar putusan dan pertimbangan hukum, pendapat para pihak, dan argumentasi hukum Mahkamah dalam putusan.
- j. Data tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang MK.
- k. Data tentang kajian fiqh siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim.

Dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:

- a. Data primer
 - 1) UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan
 - 2) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - 3) UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

4) Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.

5) Peraturan MK Nomor : 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber primer yang diperoleh dari buku literatur, artikel maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, catatan, transkrip buku, dan sebagainya. Dalam proses pengumpulan data ini di perlukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Mencari dari berbagai sumber yang di butuhkan.
- b. Mengumpulkan data secara acak dari berbagai ragam sumber data
- c. Memilih data primer dan sekunder
- d. Dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Metode Pengelolaan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah

yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an dan buku-buku literatur lainnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menggunakan pola deduktif. Dalam pelaksanaan penelitian, setelah data

¹⁴ Soejino Soekanto, *pengantar penelitian* (jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
h.112

terkumpul maka data tersebut di analisis dengan analisa deskriptif-analitik, dimana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan sosial. Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK. Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵



¹⁵ *Ibid.*

BAB II

HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

6) Pengertian Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶

Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian:¹⁷

- G. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- H. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

¹⁶ Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h .31.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91.

Menurut keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.

c. Mekanisme Pemilihan dan Penetapan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.¹⁸ Penetapan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan jabatan dan sebagainya,¹⁹ pelaksanaan janji, kewajiban, dan sebagainya.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus

¹⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia. 1996), h. 612

¹⁹ David Moelyadi, KBBI V, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI*

sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana Negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara¹ dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan adanya kelemahan dan kekurangan dalam UUD 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsip-prinsip dasar UUD.²⁰

Selanjutnya Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa membuka ruang checks and balances sehingga UUD 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh-

²⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta : Yayasan LBHI, 1998), h. 19.

kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru.²¹

Mahkamah Konstitusi Adalah lembaga Negara yang melakukan tugas kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat". Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November

²¹ Bagir Manan, Loc.Cit. Lihat juga Bambang Widjojanto, Saldi Isra, dan Marwan Mas (Edi), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. xii-xiii

²² Prakata dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003.²³ Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003. Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai

²³ <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/viewFile/169/145>, Diakses 28-11-2018

dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (constitutional review) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.²⁴

Undang-undang Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengangkatan maupun pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 15 disebutkan tentang syarat-syarat umum yang harus dipenuhi bagi hakim konstitusi ialah:²⁵

3. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
4. Adil
5. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Sedangkan syarat-syarat bagi seorang calon hakim konstitusi diatur dalam Pasal 16, yakni:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:
 - e. Warga Negara Indonesia
 - f. Berpendidikan sarjana hukum
 - g. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan

²⁴ <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/169/145>, Diakses 28-11-2018

²⁵ Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- i. Tidak sedang dinyatakan pilit berdasarkan putusan pengadilan
- j. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun

(2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Di samping diatur syarat-syarat bagi hakim konstitusi, juga diatur larangan bagi hakim konstitusi terutama untuk rangkap jabatan. Pasal 17 menyebutkan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:²⁶

- 3. Pejabat Negara lainnya,
- 4. Anggota partai politik
- 5. Pengusaha
- 6. Advokat
- 7. Pegawai negeri

Keseluruhan jumlah hakim konstitusi berjumlah 9 orang, dengan komposisi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden. Penerbitan keputusan presiden dalam ketentuan ini bersifat administrative.

²⁶ Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal rekrutmen dan pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut member masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Lebih lanjut diharapkan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dapat dijelaskan secara objektif dan akuntabel.²⁷

Adapun ketentuan mengenai tatacara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukannya, yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Sedangkan masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Adapun mengenai tatacara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tahun 2003 disebutkan:²⁸

1. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota setiap tiga tahun sekali,
2. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua.
3. Hanya anggota yang hadir dalam rapat yang berhak untuk menggunakan hak memilihnya.

²⁷ Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Rapat pemilihan dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua. Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan atau belum terpilih, rapat dipimpin oleh anggota yang tertua usianya. Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang anggota.

Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, ketua dan wakil ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir. Rapat pemilihan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 1 untuk memilih calon ketua dan tahap 2 untuk memilih wakil ketua setelah ketua terpilih.

d. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain²⁹.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

6. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

c. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ *Ibid*, h. 223

- d. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Memutus pembubaran partai politik.
 - f. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
7. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dala pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sedangkan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan pasal 12 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus.

³⁰ Bambang Sutyoso, *Op.Cit.* h.15

b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pasca pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, MK juga berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana Pasal 236 C disebutkan:

”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan konstitusi dan kedua undang-undang diatas menunjukan MK dalam menjalankan kewenangannya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final. Artinya, tidak ada lembaga dan upaya hukum lain yang dapat dilakukan kecuali menjalankan setiap yang telah diputuskan oleh MK. Sampai saat ini pasca delapan tahun terbentuknya MK, dari empat kewenangan yang diatribusi, kebanyakan yang sudah ditangani adalah *judicial review* (uji materil) undang-undang; dan, perselisihan tentang pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.³¹

Sementara, berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan lembaga negara, MK telah menerima 10 permohonan perkara. Dari sepuluh perkara itu telah diputus 10 perkara, yang terdiri dari 2 perkara ditolak, 5 perkara tidak

³¹ Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: 2011)

diterima, dan 3 perkara lagi ditarik kembali. Salah satunya, diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita. DPD mengajukan permohonan sehubungan dengan terbitnya keputusan Presiden Megawati tentang pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009. Permohonan ini disebabkan DPD merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena pengangkatan itu tidak dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPD sebagaimana diatur UUD 1945. Setelah melakukan persidangan beberapa kali, akhirnya MK mengeluarkan putusan berisi penolakan permohonan Pemohon. Perkara ini merupakan perkara pertama yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK.³²

e. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No.4 Tahun 2014

c. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Jika berbicara tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, maka secara otomatis berbicara tentang pengawasan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku sebelum adanya putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014.

Melihat perundang-undangan Mahkamah Konstitusi yang terus berubah-ubah mengikuti perkembangan permasalahan dalam lembaga Negara tersebut, dimulai dari Undang-Undang No.24 Tahun 2003, berubah menjadi Undang-

³² *Ibid*

Undang No.8 Tahun 2011 hingga perubahan terakhir Undang-Undang No.4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No.4 Tahun 2014 merupakan perubahan perundang-undangan yang terakhir dalam perkembangannya. Maka dalam pokok bahasan ini akan membahas mengenai pengawasan yang diberikan atas dasar ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 2014 atas perubahan Perppu No.1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebuah permasalahan yang kerap menjadi perbincangan, menyorot lembaga pengawal konstitusi tersebut sejak permulaan dibentuknya hingga akhir ini asalah satunya ialah pengawasannya.

Mengingat bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No. 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah menjadi UU No.4 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi membentuk dewan etik yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, yaitu suatu perangkat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluh martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dalam pedoman perilaku hakim konstitusi.³³

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang.³⁴ Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan:³⁵

³³ Pasal 2 PMK No.2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

³⁴ Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

³⁵ Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi”.

Penjelasan lebih lanjut tentang keanggotaan, wewenang serta proses pemeriksaan Majelis Kehormatan dijelaskan dalam Pasal 27A pada Bab IV a tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Bahwa untuk menetapkan kode etik, Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.³⁶

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27A Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2014, Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, menyebutkan bahwa dalam membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi selanjutnya disingkat MKHK. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap. Keanggotaan MKHK diatur dalam Ayat 5 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut³⁷

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- 1) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
- 2) 1 (satu) orang praktisi hukum;

³⁶ *Ibid*, Pasal 27A ayat (1)

³⁷ *Ibid*, Pasal 27A Ayat (5)

- 3) 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
- 4) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Perihal tentang kewenangan-kewenangan MKHK dijelaskan pada Ayat (8) yaitu:³⁸

- 1) Memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- 2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain.
- 3) Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

d. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sesudah Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 yang menyatakan dalam amar putusannya yaitu:³⁹ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

³⁸ *Ibid*, Pasal 27A Ayat (8)

³⁹ Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, 34

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah⁴⁰.

Pengawasan hakim konstitusi berlaku kembali sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengawasan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 hanya menyebutkan Majelis Kehormatan dalam dua Ayat saja (Ayat 3 dan 4) dalam Pasal 23 bagian ketiga tentang pemberhentian, yaitu:⁴¹

“Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”
 “Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.”

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Pasal 23 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun Pasal yang mengatur tentang pengawasan dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai pengawas interen terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyebutkan:⁴²

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”

Selanjutnya lebih jelas lagi MKHK diatur dalam Bab IVA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 27A Ayat (1) disebutkan:⁴³ Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- c. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- d. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- e. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- f. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- g. 1 (satu) orang hakim agung.

Hakim konstitusi yang menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugastugasnya,

⁴² Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 27A Ayat (1).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan norma dan peraturan perundang-undangan. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memuat mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dan jenis sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud ialah dapat berupa:⁴⁴

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Ketentuan mengenai pengawasan hakim yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut disebutkan sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik. Keanggotaan Majelis Kehormatan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 terdiri dari lima orang yaitu: satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴⁵ Majelis Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 27A Ayat 4 dan 5.

⁴⁵ Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 12-13.

- a. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakuakn oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Memanggil dan meminta keterangan pelapor atau saksi dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- d. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa 3 (tiga) tahun terdiri atas unsur: satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴⁷ Dewan Etik mempunyai kewenangkewenangan yaitu:⁴⁸

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konsitusi ialah:⁴⁹

- a. Melakukan perbuatan tercela.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (1).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (2).

- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi.
- f. Melanggar larangan hakim konstitusi seperti:
 - 9. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri.
 - 10. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung, maupun tidak langsung.
 - 11. Mengekspresikan pendapat atau pernyataan diluar persidangan atas perkara yang sedang ditanganinya (mendahullui putusan).
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi, seperti:
 - 3. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - 4. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak.
 - 5. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 22.

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2).
- b. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2), untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk dimintai dokumen atau alat bukti.
- c. Memanggil dan menerima keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, termasuk meminta dokumen dan alat bukti.
- d. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapat teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

a) Pengertian Hakim Menurut Islam

Hakim dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari الحاكم semakna dengan *qâdhi* yang artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim memiliki dua arti. *Pertama*, orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak dalam prilaku dan dalam melakukan sesuatu.⁵² Dari kemudian dipahami bahwa hakim adalah orang yang menentukan keputusan dengan baik dan benar karena ia memiliki hikmah. Kata hikmah ini sendiri dalam bahasa Arab berarti berilmu, cakap, pandai, budiman, dan bijaksana. Adapun pengertian menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁵³ Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qâdhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleknya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.

⁵¹ Muhammad Salam Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, (Ttp.: Tnp., t.t.), h.11.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 383.

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 39.

1. Sejarah Hakim Dalam Islam

Keberadaan lembaga peradilan sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam datang, kehadiran Islam tentunya memberikan warna tersendiri terhadap keberadaan peradilan itu sendiri, ini disebabkan karena Islam mempunyai pedoman tersendiri dalam menyelenggarakan peradilannya, akan tetapi bukannya Islam tidak menghiraukan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang dihadapi saat itu, sehingga peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Islam juga tidak dianggap kaku. Ini terlihat dari perkembangan peradilan Islam yang dilalui dari masa ke masa, dimulai dari masa Rasulullah SAW sampai peradilan di masa Daulat Usmaniyah.

a. Peradilan di Masa Rasulullah SAW

Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW adalah seorang kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau telah mendirikan negara bersama-sama orang-orang pribumi (Ansar) dan masyarakat pendatang (Muhajirin). Beliau membuat konstitusi tertulis (Undang-undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, memberi perlindungan kepada umat non Islam. Beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar kebulatan tekad Aqabah. Inilah negara yang jujur tetapi bukan negara toleransi, karena beliau tidak menganggap dirinya anak Tuhan tetapi adalah hamba Allah, pesuruh-Nya dalam menyampaikan rahmat bagi seluruh alam.

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim

atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat⁵⁴. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah.⁵⁵ Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah SWT yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An Nisa' ayat 65;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Setelah dakwah Islam tersebar, maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum terhadap perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga di antara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi berada, dan hal ini dimaksudkan sebagai pendidikan bagi sahabatnya tentang ijtihad, memutuskan perkara dan memimpin

⁵⁴ Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 4

⁵⁵ *Ibid*

bangsa, serta membimbing dan menyiapkan bolehnya mengangkat penguasa-penguasa dan hakim-hakim.

Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah menizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunah Rasul, ijtihad atau qiyas. Pedoman ini jelas kita peroleh dalam hadis Mu'adz Ibn Jabal di waktu beliau diangkat menjadi gubernur dan hakim di Yaman.⁵⁶ Nabi membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutuskan perkaraperkara sengketa, adalah karena hukum-hukum Al Qur'an yang telah turun, hanya mengenai beberapa kejadian saja, demikian pula sabda-sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang umummiyah bukan juz'iyah yang terus menerus terjadinya di setiap masa dan tempat. Menurut Dr. Athiyah Musthafa musyrifah, sebagaimana yang dikutip oleh Asadulloh Al Faruq, ciri khas peradilan pada masa Rasulullah SAW setidaknya ada lima yaitu;⁵⁷

- a. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain, ini disimpulkan dari perkataan Ali, "kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya".
- b. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa.

⁵⁶ TM Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 10

⁵⁷ Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 5

- c. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.
- d. Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya.
- e. Belum terdapat lembaga pemasyarakatan (penjara) sebagaimana yang dikenal di masa sekarang.

Di dalam literatur yang lain ditambahkan pula satu ciri khas di antara lima ciri khas yang disampaikan di atas, ciri khas itu adalah bahwa di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang terjadi itu menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, atau diganti dengan keputusan baru.⁵⁸

Dilihat dari kata-kata Ali sampai kamu datang (sendiri) kepada Rasul SAW; sedang Ali tidak memaksa mereka mematuhi keputusannya, dalam kedudukannya sebagai pembentuk hukum dan sebagai hakim kaum muslimin dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum-hukum Islam dan bahkan ia lebih menonjolkan dalam kedudukannya sebagai qodli', yaitu tampak dalam kata-katanya agar ia (Nabi SAW) memutuskan di antara kamu; dan juga dilihat dari kata-kata Nabi SAW ketika perkara itu dinaikkan banding kepadanya: "itulah apa

⁵⁸ Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, h. 29

yang telah diputuskan di antara kamu; ini semua memberi arti tentang adanya pengukuhan keputusan hukum dari qadli" pada (pengadilan) tingkat pertama (oleh pengadilan yang lebih tinggi).

b. Peradilan di Masa Khulafa' Rasyidin

Sepeninggal Rasulullah SAW pucuk pimpinan pemerintahan Islam digantikan oleh Abu Bakar, di tangan Abu Bakar ini kondisi peradilan Islam tidak banyak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasul SAW, peperangan melawan Nabi palsu Musailah Al Kadzab, menundukkan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat, serta urusan politik dan pemerintahan yang lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu. Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, Abu Bakar selalu melihat isi Al Qur'an, jika ia menemukan hukum Allah di dalam Al Qur'an atas persoalan yang dihadapi maka ia memutuskan perkara dengannya. Akan tetapi jika tidak ditemukan maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunah-sunah Rasul. Jika ia belum menemukan keputusan berdasarkan Al Qur'an dan sunah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk diminta keterangan terhadap perkara yang dihadapi, barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara yang di hadapi. Dan manakala tidak bisa diambil keputusan dengan tiga jalan tersebut, maka ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk

menentukan putusan yang hendak diambil, jika semua yang hadir sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka Abu Bakar berpegang pada keputusan itu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk ijma'.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), hal ini dipengaruhi oleh semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, semakin banyaknya beban-beban yang menyangkut bidang peradilan, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, keharusan peningkatan perhatian dalam urusan pemerintahan di daerah-daerah, serta telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat.

Oleh karena tugas peradilan sebagian dari kewenangan umum itu, maka kepala negaralah yang memegang wewenang ini dan dialah yang mengangkat para hakim untuk perkara-perkara khusus. Karena itulah diwaktu Umar mengangkat beberapa orang menjadi hakim, beliau membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan. Di dalam masa Khulafa' Rasyidin, belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan, hal ini disebabkan karena qhodi'lah yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya. Pada masa itu, hakim di samping

bertindak sebagai pemutus perkara, juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani.

c. Peradilan di Masa Bani Umayyah

Perkembangan peradilan pada masa bani Umayyah menunjukkan perubahan, di mana khalifah mempunyai peranan besar karena ia mengangkat para hakim di ibukota pemerintahan, sedang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya.

d. Peradilan di Masa Bani Abbas dan Sesudahnya

Di masa bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas, dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian dan kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fiqh, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taqlid, yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qodi' di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah;⁵⁹

c. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum.

d. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah.

⁵⁹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 22-23

- e. Lahirnya istilah atau kedudukan Qodi' Al Qudot, lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang.

Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri, Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan waqaf dan menunjukan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur.

e. Peradilan di Masa Daulat Usmaniyah

Pada masa pemerintahan Usmaniyah, terjadi keterbukaan di bidang hukum dan hal ini membawa juga kepada hal pengangkatan hakim-hakim dan kekuasaan peradilan, di samping membiarkan kekuasaan praktis lainnya berada pada wewenang raja-raja. Makna tasamuh (toleransi) pun berkembang lebih jauh di bidang agama terhadap golongan zimmi yang melampaui apa yang digariskan fuqoha', sejauh mereka tunduk kepada kekuasaan peradilan di dalam daulat Islamiyah, maka daulat Usmaniyah telah memperkenankan berdirinya peradilan untuk golongan-golongan agama di luar Islam. Di masa Mesir diperintah oleh Khadwi Taufiq, Mesir telah mencapai kesempurnaannya di bidang kekuasaan peradilan dan wewenangnya, dan undang-undang yang wajib diterapkan bukannya fiqh Islm secara keseluruhan sehingga di Mesir ada lima peradilan yang hukum-hukumnya diambil dari berbagai sumber yang berbeda-beda.

m. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.⁶⁰ ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat. Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik /moralitas yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya).

Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.⁶¹ Oleh karenanya, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, *dhahir* iman hatinya, selalu menjaga *murū'ah*nya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.

⁶⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Rosda Karya , 1997), h. 104.

⁶¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.33

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.⁶² Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhâr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶³ Artinya, hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁴ Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

⁶² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), h. 104.

⁶³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1)

⁶⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1)

Dalam menyelesaikan suatu perkara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim diantaranya mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.⁶⁵ Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu mengkualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan menemukan hukumnya. Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara. Tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sesuai dengan doktrin *Curia Ius Novit*.⁶⁶ Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas.⁶⁷

Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan

⁶⁵ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 37.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 37.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.⁶⁸ Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Dan tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

n. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim

Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum-hukum Allah ini sendiri disebut dengan qadha'.⁶⁹ Ulama mengategorikan hukum qadha' adalah fardhu kifayah. Harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia. Beban ini diberikan kepada penguasa atau khalifah. Dalam sebuah wilayah tertentu, khalifah boleh mewakilkan kewajiban ini kepada hakim. Jadi, dalam Islam, sejatinya

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 38.

⁶⁹ <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>

hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah utamanya dalam penerapan hukum Islam. Aturan ini dimaknai dari hadis Rasulullah SAW, "Tidak halal bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka." (HR Ahmad).

Seorang hakim sebagai wakil Allah SWT dan khalifah memiliki tugas yang sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi keadilan dan nilai-nilai syara, tempatnya adalah di neraka. Hakim sendiri menurut sebuah hadis terbagi dalam tiga kelompok. Dua kelompok akan dimasukkan ke dalam neraka dan hanya satu kelompok yang selamat hingga ke surga. Kelompok hakim yang masuk surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut.⁷⁰

Sementara, hakim yang paham bagaimana yang baik dan benar namun memutuskan perkara dengan menyimpang maka ia adalah golongan penghuni surga. Golongan ketiga adalah hakim yang bodoh dan memutus perkara dengan kebodohnya. Pembagian ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.

Dalam konsep hukum Islam, sejatinya jabatan qadhi bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi. Karena begitu berat konsekuensi dari seorang hakim, ia harus siap menanggung semua beban itu. Hakim tak layak diisi oleh orang yang ambisius mengejar jabatan. Orang yang mengejar kedudukan

⁷⁰ *Ibid*

cenderung mengabaikan hak orang lain, tidak amanah, dan berpeluang besar menjadi khianat.

Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasai tugas ini (hakim) kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya." (HR Bukhari Muslim). Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza memberikan beberapa syarat bagi mereka yang berhak diangkat menjadi hakim. Seorang hakim dalam hukum Islam mestilah Muslim, berakal, baligh, merdeka, memahami Alquran dan sunah, mengetahui dengan apa ia memutus perkara, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Syekh Abu Bakar juga mewanti-wanti kepada siapa pun yang menjabat sebagai hakim agar menjauhi hal-hal berikut. Pertama, tidak memutus sebuah perkara dalam keadaan emosi, lapar, sakit, atau malas. Sabda Nabi SAW, "Seorang hakim tidak boleh memutus perkara di antara dua orang yang berperkara dalam keadaan marah." (HR Bukhari Muslim).⁷¹ Seorang hakim juga tak boleh memutus perkara tanpa adanya saksi, tidak boleh memutus perkara yang ada kaitan dengan dirinya seperti perkara anaknya, bapaknya, atau istrinya. Tidak boleh menerima suap dalam menetapkan hukuman. Nabi SAW bersabda, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerimanya dalam menetapkan hukuman." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). Ia juga tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum diangkat menjadi hakim. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kami memberinya rezeki (gaji), maka

⁷¹ Hadist Riwayat Bukhari Muslim

sesuatu yang diduplikatkannya setelah itu adalah pengkhianatan." (HR Abu Daud dan Hakim).

Dasar disyariatkannya, atau landasan normatif kedudukan hakim, adalah *al-kitāb*, *al-sunnah* dan *ijmā'*. Dasarnya dari *al-kitāb* atau Al-Qur'an adalah antara lain QS. al-Baqarah: 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Demikian pula dalam QS. al-Māidah (5): 49, Allah berfirman :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Kemudian dasarnya dari segi sunnah *fi'liyah*, Nabi SAW telah melaksanakan sendiri proses-proses persidangan dengan memimpin langsung jalannya persidangan, dan juga telah menjatuhkan putusan dalam banyak kasus. Di samping itu Nabi SAW telah mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman, kemudian tugas itu dilanjutkan oleh Ali bin Abī Tālib ra. Kaum muslimin juga sepakat (*ijma'*) dari sejak masa Nabi saw hingga kini mengenai disyariatkannya penunjukan para hakim dan tugas-tugas mereka dalam memutuskan sengketa di kalangan masyarakat. Lebih dari itu, para ulama dan masyarakat muslim secara umum menyepakati perlunya jabatan hakim berdasarkan *qiyās* (analogi), sebab berbagai perkara hukum yang dihadapi mereka menuntut solusi dan

penyelesaiannya secara adil. Tentu saja, hal yang demikian hanya bisa terselesaikan bila ada hakim yang menanganinya.

Di samping yang telah disebutkan, landasan normatif kedudukan hakim, juga berdasar pada aturan perundangundangan, yakni Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 tentang Kehakiman.⁷² Kemudian ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terdapat dalam 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang merinci tugas-tugas hakim di lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 63 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁷³ Khusus kedudukan hakim di Pengadilan Agama yang kini telah satu atap dengan Mahkamah Agung, juga memiliki landasan normatif berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kezaliman sehingga terjaminnya ketenteraman masyarakat.

Imam Mawardi menyatakan bahwa bahwa hakim harus diketahui identitasnya, harus memahami tugas atas pekerjaannya, menyebut wewenang dan

⁷² Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 44-45.

⁷³ *Ibid*

wilayahnya (Negara atau Propinsi).⁷⁴ Sedangkan dalam literatur Islam atau fikih ada beberapa persyaratan yang menjadi persamaan dan perbedaan. Persamaannya hakim harus berakal, Islam, adil, berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, dan merdeka bukan hamba sahaya.⁷⁵ Adapun perbedaannya adalah disyaratkan hakim laki-laki dan tidak boleh perempuan. Meskipun ini menjadi perdebatan para ulama. Ulama dari empat mazhab kecuali Abû Hanîfah membolehkan selain dalam urusan *had* dan *qishâsh*, karena kesaksian dalam dua hal tersebut tidak dapat diterima.⁷⁶ Hadis menerangkan bahwa perempuan dianggap belum mampu membawa kemenangan atau kemajuan. Persyaratan wanita tidak boleh menjadi hakim, merupakan persyaratan pada masa dahulu dikarenakan luasnya wilayah Islam, dan banyaknya permasalahan yang muncul sehingga menjadi kompleks, sedangkan lembaga peradilan masih sangat sedikit. Namun dalam konteks kontemporer, peradilan yang sudah merata dan perkembangan kehidupan yang semakin maju, persyaratan-persyaratan tersebut sudah tidak relevan lagi.

Berdasarkan hadis dan ijma dijelaskan tentang keutamaan ijtihad seorang hakim. Ijtihad yang dilakukan hakim sebagai salah satu usaha menggali hukum guna melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Sejarah Islam membuktikan, posisi hakim sangat dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Hal

⁷⁴ Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2000), h. 142-143.

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 487.

⁷⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 35-43.

ini seperti pada masa Bani Umayyah, misalnya, khalifah mengangkat *qâdhi* pusat, sementara di daerah diserahkan pada penguasa daerah dan hanya diberi wewenang untuk memutuskan perkara, sedangkan untuk pelaksanaan putusan oleh khalifah langsung atau oleh utusannya.⁷⁷ Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah dibentuknya Mahkamah Agung, pembentukan hakim setiap wilayah, pembukuan dan mulainya organisasi peradilan, sehingga menempatkan hakim sebagai sosok yang sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting.⁷⁸



⁷⁷ Muḥammad Salam Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, h. 29.

⁷⁸ Muḥammad Salam Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, h. 30-32

BAB III

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

k. Pengertian Pengawasan

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan.⁷⁹ Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa *inggris* disebut *controlling*.⁸⁰ Dalam bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.⁸¹

⁷⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 101.

⁸⁰ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 53.

⁸¹ *Ibid.*, h. 53.

Menurut Admosudirdjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Winardi pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Stoner, Freeman, dan Gilbert menyebutkan bahwa fungsi pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang telah direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.⁸²

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

⁸² Kartika Legawati, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik*, Jom FISIP, Volume 1 No.2-Oktober 2014, h. 4

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktifitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

Kegiatan pengawasan ditujukan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi

organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu untuk (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Sudibyo Triatmodjo yang merangkum pendapat sejumlah pakar menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan atau yang terjadi.⁸³

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi, melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutism kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.⁸⁴

1. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

⁸³ Sudibyo Triatmodjo, *Sistem Pengawasan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000, h. 5.

⁸⁴ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, hlm. 207, Komisi Yudisial RI, Jakarta

2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan.⁸⁵ Dengan adanya pengawasan maka pelaksanaan dapatlah diperingan karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari hari, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi memperbaiki kesalahan.⁸⁶

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁷

8. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.

⁸⁵ Y. W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Peemerintah di Daerah, Rineka Cipta*, Jakarta, 1996, h. 103

⁸⁶ Yosef Rifu Kawo, *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h. 194.

⁸⁷ Sondang P Siagian, *Op.cit.* 135.

9. Pengawasan harus bersifat “*preventif*” yang berarti bahwa pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang ditentukan.
10. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
11. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir.
12. Pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan tercapainya tujuan.
13. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang betul dan yang akan diperbaiki.
14. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

m. Mekanisme Pengawasan

Usaha yang sangat penting dilaksanakan/dilakukan dalam melaksanakan sistem yang lebih efektif, efisien adalah dengan kerja keras, kreatif, bertanggung jawab disertai dengan dedikasi penuh. Jadi agar tercipta apa yang diharapkan maka sistem pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi yang lebih mantap antara instansi vertikal yang terkait karena berbagai proyek pemerintah yang ada di daerah juga dilakukan oleh instansi/lembaga-lembaga pemerintah non departemen. Dalam proses pengawasan secara umum menurut M.Manullang terdiri dari tiga fase, yaitu:⁸⁸

⁸⁸ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) h.183.

6. Menetapkan alat pengukur/standard
7. Mengadakan penilaian
8. Mengadakan perbaikan

Bila seorang hendak mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal ini baru dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur atau penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan alat pengukur atau penilainya adalah merupakan standard, yaitu dapat berupa rencana, program kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan. Dalam hal pengawasan pada zaman Rasulullah ialah sebagai alat ukur al Qur'an dan ketetapan Rasulullah sendiri.

Pada fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak. Pada fase ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini merupakan konsekwensi dari tahap kedua. Maksudnya apabila pada fase kedua ditemukan ketidak-sesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fase kedua ditemukan penyimpangan atau penyelewengan. Tindakan perbaikan tersebut menurut M. Manullang diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekwensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan kemudian dilakukan perbaikan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan disamping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

Berbicara tentang pelaksanaan pengawasan itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, jalur yang pertama yakni melalui pengawasan melekat, pengawasan melekat merupakan kombinasi dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen.

Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan, meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap harus melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anak buahnya, pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa, efektivitas ini sehubungan dengan adanya 3 sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni

⁸⁹ *Ibid*, h.188

bersifat tepat, cepat, dan murah.⁹⁰ Inefektivitas melekat lebih banyak ditimbulkan karena sebab-sebab yang bersifat intern dari dalam tubuh organisasi yang bersangkutan, inefektivitas pengawasan melekat dapat terjadi karena lemahnya pengawasan atasan langsung dan lemahnya sistem pengendalian manajemen.

Jalur kedua pengawasan yakni melalui pengawasan fungsional, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi, pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:⁹¹

- 7) Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:
 - o. Kontrol intern (*internal control*). Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis, bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrative atau *built in control*.

⁹⁰ Muchsan, *Op.cit.* hlm. 42-43.

⁹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, h.133

p. Kontrol *ekstern*, pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, control politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawarah Masyarakat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif), kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

8) Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut: ⁹²

g. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.

h. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan keliru.

9) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

3. Kontrol *a-prior*, pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau

⁹² *Ibid.*

peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah, kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.

4. Kontrol *a-posteriori*, Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah, pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

10) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas: ⁹³

- e. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*), kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
- f. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*oppurtunitas*), pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (*oppurtunitas*).

11) Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan mengutip pendapat Hertogh dapat dibedakan atas:

⁹³ *Ibid*

12. Pengawasan unilateral (*unilateral control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.

13. Pengawasan refleksif (*reflexive control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

n. Dasar Hukum Pengawasan

Ketentuan pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas ekstern terhadap hakim Mahkamah Konstitusi secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan:⁹⁴ “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan meenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Secara terminologis hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud ekstern (*control ekstern*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai

⁹⁴ Pasal 24B UUD 1945 Pasca-Amendemen.

anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁹⁵ Tetapi putusan Nomor 005/PUU/2006 Mahkamah Konstitusi menjadikan terhambatnya pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Pengawasan hakim menjadi terhambat karena dalam putusannya menyatakan bahwa sepanjang mengenai kata-kata Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu (*auxiliary institution*) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi “pengawas eksternal” KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 24B Ayat (1) UU tentang Komisi Yudisial.⁹⁶

Pengaturan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, merupakan ketentuan lebih

⁹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. h. 170-171.

⁹⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. h.221.

lanjut dari amanat konstitusi yang tetuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang.⁹⁷ Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan:⁹⁸

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi”.

Penjelasan lebih lanjut tentang keanggotaan, wewenang serta proses pemeriksaan Majelis Kehormatan dijelaskan dalam Pasal 27A pada Bab IVa tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Bahwa untuk menetapkan kode etik, Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.⁹⁹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27A Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2014, Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, menyebutkan bahwa dalam membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi selanjutnya disingkat MKHK. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis

⁹⁷ Pasal 44 Ayat 1 dan 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁸ Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 27A ayat (1).

Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap. Keanggotaan MKHK diatur dalam Ayat 5 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- c) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
- d) 1 (satu) orang praktisi hukum;
- e) 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar

belakang di bidang hukum; dan

1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Perihal tentang kewenangan-kewenangan MKHK dijelaskan pada Ayat (8) yaitu:¹⁰¹

- b) Memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- c) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
- d) Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

o. Pengawasan Menurut Hukum Islam

Dalam islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang yang juga mengawasi kinerja kita, seorang pemimpin harus mampu

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 27A Ayat (5).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 27A Ayat (8).

mengawasi semua kinerja dari karyawannya agar tujuan dari sebuah organisasi dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

Pengawasan dalam bahasa arab memiliki makna yang sama dengan *ar-Riqobah*. Dalam tafsir Ibnu Katsir¹⁰² kata “Raqiba”, dijelaskan bahwa Allah mengontrol atau mengawasi dari setiap perbuatan manusia sebagaimana dalam surat al-Buruuj ayat 9

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

Artinya: “yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu”.

Raqiba dalam tafsir Abi Su’ud¹⁰³ dijelaskan bahwa dalam hal ini kata *raqiba* dalam gramatikal arab diartikan sebagai sighthat mubalaghah dari kata *raqoba* *yarqibu* *raqiban*. Bahwa Allah akan mengawasi atau mengontrol dengan sejatinya dari setiap sesuatu perbuatan dan perkataan sehingga pada keinginan yang terpendam yang berupa niat sekalipun tidak lepas dari pengawasanNya.

Dalam tafsir ar-Rozi¹⁰⁴ dikemukakan penjelasan *raqiba* bahwa *raqiba* adalah pengawasan Allah terhadap semua yang telah diperbuat dan Allah mengetahui terhadap sesuatu yang jelas maupun yang samar. kaitannya

¹⁰² Abul fida’ bin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu Katsir fi Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, juz 2, (Mauquiu Majma’ al Mulk littibaat al-Syarifah: dalam Software Maktabah Samilah, 2005) h. 206

¹⁰³ Muhammad bin Muhammad al-Imady Abu Su’ud, *Tafsir Abi Su’ud fi al-Kitab Irsad Al-Aqlu as- Salim Ila Mazaya Al-Qur’an Al-Karim*, juz 2, (Dar Al-Ihya’ al-Turas al-Araby dalam Software Maktabah Samilah, 2005) h. 139.

¹⁰⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain at Taymi ar-Rozi (Fahrudin ar- Rozi), *Tafsir ar-Rozi*, juz 5, (mauqiut tafaasir talam Software Maktabah Samilah, 2005), h. 40.

dengan controlling bahwa pengawasan (controlling) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang (revisi).

Dari beberapa tafsiran di atas tentang kata Raqiba dapat di simpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara substansial menafsirkan kata Raqiba yaitu pengawasan Allah terhadap semua yang telah diperbuat oleh makhlukNya baik terhadap sesuatu yang jelas maupun yang samar. Dalam hal manajemen, setiap bentuk kepemimpinan, proses pengawasan atau ar- riqobah merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan betul-betul dikerjakan atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalah gunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk yang tepat pada tahap berikutnya.

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membnarkan yang hak. Pengawasan (*Control*) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Said, "Fungsi Pengawasan Dalam Islam", <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Alqur'an disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 7¹⁰⁶

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۚ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : *Tidaklah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari

¹⁰⁶ Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 135

mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 104¹⁰⁷

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemunkaran. Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah,

¹⁰⁷ Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 180

khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni sebagai berikut :

- e. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)
- f. Pengawasan masyarakat
- g. Pengawasan Peradilan manajemen

p. Pengawasan Hakim Menurut Fiqh Siyasah

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al Quran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah yang disusun oleh Muftahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.¹⁰⁸

Siyasah berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan *policy (of government; coorproction, etc)*. jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengurus, mengatur, mengurus,

¹⁰⁸ *Ibid.*, 22.

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.¹⁰⁹

Fiqh siyāsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, fiqh siyāsah merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyāsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.¹¹⁰

Kajian tentang hakim sangat penting mengingat posisi hakim yang sangat sentral dalam penegakkan hukum. Hakim sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan peradilan menempati posisi yang menentukan dalam menjawab kebutuhan pencari keadilan di pengadilan. Terwujudnya tujuan peradilan sangat ditentukan oleh kapasitas, kapabilitas dan integritas para hakimnya. Atas posisinya yang sangat menentukan tersebut, tak heran jika hakim sering digambarkan sebagai “wakil Tuhan di bumi”.

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*, 23.

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007), h. 11

¹¹¹ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, h. 207.

Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.¹¹²

Pengawasan hakim dalam Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam kode etik hakim hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut. Logikanya adalah hanya orang yang bertaqwa, orang yang percaya kepada Allah swt yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan keyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak-gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawas yakni Allah swt, seorang hakim bisa saja akan berperilaku menyimpang saat ia yakin bahwa ia tengah lepas dari pengawas yang ada di dunia, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan.¹¹³

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

¹¹² Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. (Liberty: Yogyakarta), h. 37.

¹¹³ Asni, *Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam*, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8 No. 2, Desember 2018, h. 30.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹⁴

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya memuat acuan syari'ah. Tugas ini dirancang agar syari'ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturanperaturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan salat jemaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (alqada'), mengawasi pasar (al-hisbah), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam timbangan, ukuran; kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan pemerintahan pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat Kepala Negara, Presiden, Menteri, Panglima, Hakim, dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan; tugas di bidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁵

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan eksekutif,

¹¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*. h.26.

¹¹⁵ *Ibid.*

kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan ini disebut *al-sultah altanfidhiyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *alsultah al-tasyri'iyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sultah al-qad'a'iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.¹¹⁶

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 1). *Sultah Tanfizhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undangundang), 2). *Sultah Tasyri'iyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang), 3). *Sultah Qad'a'iyyah* (kekuasaan kehakiman). 4). *Sultah Maliyyah* (kekuasaan keuangan), 5). *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Al-Sultah al-Qada'iyyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (peradilan) merupakan suatu lembaga yang telah dikenal sejak dari zaman purba sampai dengan masa sekarang ini dan dia merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar keberadaannya sebab lembaga peradilan merupakan salah satu prasyarat tegaknya pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para warga negara. Peradilan adalah merupakan tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang masih terbelakang maupun bangsa-bangsa yang tergolong sudah maju.

¹¹⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126.

Khususnya asas pengawasan (*al-muraqabah*), dalam pandangan islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: **Pertama**, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 1, surat Qaaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa': 1)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir. (Q.S Qaaf: 18)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Infitar:10-12)

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. **Kedua**, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.¹¹⁷

Dalam suatu peradilan terdapat seorang *Qadi* (hakim) yang mengurus peradilan, *Qadi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *Qad* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadi*. *Qadi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.¹¹⁸ Agar *Qadi* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang qadhi dan dalam Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku *Qadi* adalah *Qadi al-Qudat*.

Dengan demikian pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana 2007), h. 33.

mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada di bawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).



BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.4 tahun 2014

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu aktifitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

Kegiatan pengawasan ditujukan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu untuk (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilakukan oleh internal dalam tubuh organisasi MK, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dalam organisasi yakni Komisi Yudisial sebagai wadah diluar organisasi, dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.

Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. Melihat mekanisme pengawasan dari perspektif normatif dalam UU No. 4 Tahun 2014 untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi menyebutkan bahwa dalam membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi selanjutnya disingkat MKHK, Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap akan tetapi dalam keanggotaan MKHK Komisi Yudisial tidak termasuk dalam anggota tersebut, yang terdiri atas 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum dan 1 orang tokoh masyarakat. Perihal tentang kewenangan-kewenangan MKHK dijelaskan pada Ayat (8) yaitu: Memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen

atau bukti lain serta Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

Sedangkan, mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut.

Berbeda dengan mekanisme pengawasan MKHK dari prespektif normatif dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Etik, apakah memang benar pelanggaran itu dilakukan. Lantas kemudian Dewan Etik mengusulkan pembentukan MKHK untuk menyelenggarakan persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terduga atau terlapor melakukan pelanggaran.

Dalam keanggotaan Majelis Kehormatan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 terdiri dari lima orang yaitu: satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Berbeda dengan Majelis Kehormatan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011, tampak perubahan atas

keanggotaan Majelis Kehormatan yakni digantinya anggota dari unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung. Karena UU No. 8 Tahun 2011 telah di *judicial review*, dalam putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan menghapus 3 (tiga) unsur tersebut karena dinilai akan mencampuri independensi Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MKHK dalam UU No. 8 Tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan kewenangan MKHK dalam UU No. 4 Tahun 2014, yaitu pengawasannya sebatas hanya dalam persidangan saja. Jika ditelaah lagi dalam PMK No. 2 Tahun 2014, sesungguhnya Dewan Etik yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa 3 (tiga) tahun terdiri atas unsur: satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Wewenang pokok yang diberikan kepadanya ialah berupa Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan wewenang tambahan guna untuk mengefektifkan pengawasan terhadap hakim konstitusi yaitu: a). Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran. b) Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk dimintai dokumen atau alat bukti. c) Memanggil dan menerima keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

hakim terlapor atau hakim terduga, termasuk meminta dokumen dan alat bukti. d) Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran. e) Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapat teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. f) Mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

Dewan Etik yang banyak diberikan keleluasaan untuk mengawasi menjadi peran vital dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi, sedangkan keanggotaannya hanya terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, guru besar dalam bidang hukum dan tokoh masyarakat. Juga mempunyai wewenang mengusulkan pembentukan MKHK, dan jika Dewan Etik tidak mengusulkan pembentukan MKHK kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara otomatis tidak akan terjadi persidangan terhadap hakim terduga atau terlapor yang melakukan pelanggaran atas laporan dari masyarakat atau instansi. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah memasukan Komisi Yudisial sebagai kategori pengawas ektern dalam Majelis Kehormatan. Namun perlu dicatat, bahwa mekanisme pengawasan dilihat dari posisi keberadaan KY dalam MK berbeda dengan model mekanisme pengawasan ektern Mahkamah Agung yang menempatkan posisi KY secara mandiri dan diberi keleluasaan wewenang dalam melakukan pengawasan.

Tidak dilibatkannya peran Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan ditubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Aspek partisipatoris dan kontrol dalam kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol eksternal.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.4 tahun 2014 yaitu diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dianggap baik karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Tujuan Fiqh Siyasah terhadap Pengawasan Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Fikih siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut kajian fiqh siyasah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an khususnya asas pengawasan (*al-muraqabah*), yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan ketentuan itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Khusus asas pengawsan (*al-muraqabah*), dalam pandangan islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang

salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: **Pertama**, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 1, surat Qaaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa': 1)*

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: *Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir. (Q.S Qaaf: 18)*

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat*

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Infitar:10-12)

Berdasarkan ayat diatas mewakili landasan didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. **Kedua**, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Peradilan terdapat seorang *Qadi* (hakim) yang mengurus peradilan, *Qadi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *Qad* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadi*. *Qadi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.¹¹⁹ Agar *Qadi* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang qadhi dan dalam Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku *Qadi* adalah *Qadi al-Qudat*.

Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah*

¹¹⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana 2007), 33

atau lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada di bawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).

Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, di dalam hak mengawasi/mengontrol oleh masyarakat (*Haq al-Muraqabah*) terdapat suatu lembaga menurut Abdul Qadir Audah yaitu *al-Sultah al-Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat), tapi kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Jika demikian, maka konsep pengawasan yang lebih khusus terhadap hakim ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sultah al-Qada'iyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu organ yang bernama *Qadi al-Qudat* dan diberikan wewenang dalam hal mengawasi hal ihwal para *qadi*, lembaga ini merupakan lembaga diluar lembaga peradilan lain yang berfungsi sebagai pengawas eksternal karena mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan melekat. Hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial yang juga berada dalam lingkup kekuasaan yudikatif/kehakiman di dalamnya terdapat Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial akan tetapi KY bukan pelaksana kehakiman, KY bukanlah penegak norma hukum tetapi penegak norma etik.

Apabila dilihat pada organisasi Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya, organisasi MK memiliki mekanisme pengawasan internal berupa pengawasan yang dilakukan hakim dan jajaran struktrul organisasi yang lebih tinggi dalam organisasi MK yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi MK. Pengawasan internal tersebut ialah melalui MKHK, Dewan Etik serta jajaran struktural organisasi. Maka untuk mencapai hasil yang ideal, dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal, penerapan konsep independensi kekuasaan kehakiman terutama dalam tubuh MK tidak boleh absolut. Perlu adanya penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal melalui peran Komisi Yudisial sehingga tercipta pengawasan yang partisipatoris dan efektif, seperti halnya lembaga *Qadi al-Qudat* dalam Islam yang dibentuk diluar pengadilan, bertugas untuk mengawasi hal ihwal para *qadi*.

Secara khusus tidak ada dalam literatur fiqh siyasah menyebutkan mengenai lembaga pengawas hakim seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, jika melihat kewenangan *Qadi al-Qudat* dalam mengawasi hakim lembaga tersebut seperti halnya Komisi Yudisial. Juga bersifat fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau

ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.

Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasah dengan prinsip *al-Muraqabah* (pengawasan) *Qadi al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah. Dengan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang memadai, selaras dan senafas dengan yang bersumber utama dari fiqh siyasah yaitu mekanisme “dari diri sendiri dan diluar diri sendiri” dalam aspek asas pengawasan (*al-muraqabah*), sudah teraplikasi dalam praktek ketatanegaraan Islam Dinasti Abasiyyah berupa lembaga *Qadi al-Qudat* yang bersifat permanen dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qadi*.

Tidak cukup dengan hanya Mahkamah Konstitusi sudah memasukan Komisi Yudisial sebagai kategori pengawas ektern dalam Majelis Kehormatan yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2011. Tidak dilibatkannya peran Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik.

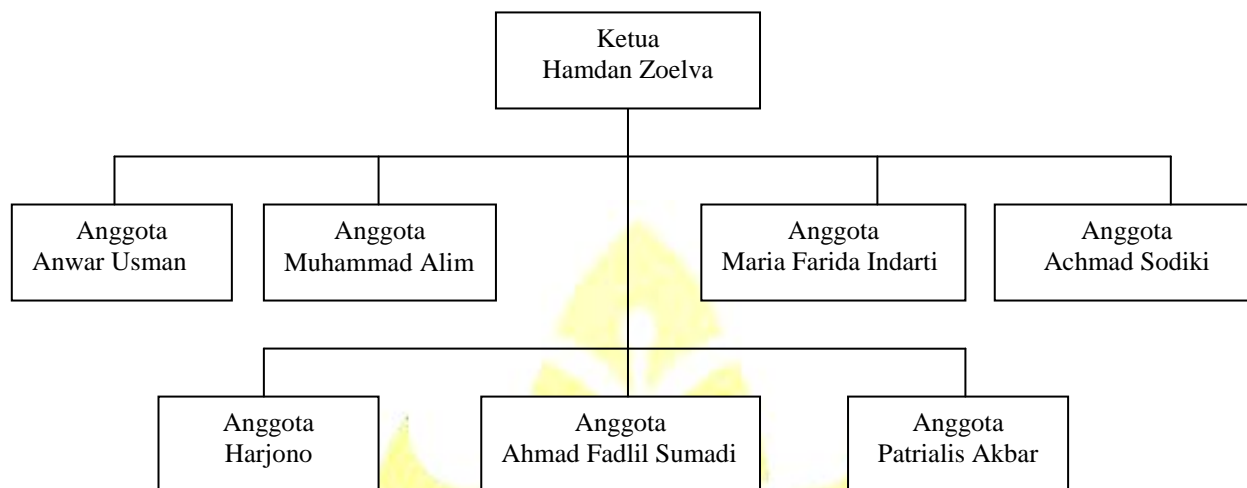
Mekanisme pengawasan jika dilihat dari posisi keberadaan KY yang berada dalam MK berbeda dengan model mekanisme pengawasan ektern Mahkamah Agung yang menempatkan posisi KY secara mandiri dalam melakukan pengawasan. Menunjukan aspek partisipasi dan kontrol dalam

kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bahwa sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan ditubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol ektern. Masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan (*al-muraqabah*), seperti lembaga *Qadi al-Qudat* yang bersifat preventif dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qadi* oleh khalifah. Jalannya organisasi MK akan terhindar dari munculnya penyimpangan-penyimpangan dengan peraturan yang merugikan MK. Dengan adanya mekanisme sistem internal dan eksternal yang berjalan baik membuat setiap indikasi terjadinya penyimpangan akan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka akan dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk memelihara kemaslahatan serta menanggulinya agar tidak bergulir menjadi penyimpangan sekaligus menghindari *mafsad at* (madarat) yang lebih besardan luas. Selain itu mekanisme sistem internal dan eksternal bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi MK sehingga langkah-langkah perbaikan dan

peningkatan dapat dilakukan. Adanya sistem pengawasan ini pada artinya akan dapat menciptakan organisasi MK yang sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.

Mekanisme Pengawasan Hakim



Menimbang, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah memandang perlu untuk menggabungkan dua permohonan yaitu Permohonan Nomor 1/PUU- XII/2014 (para Pemohon I) dan Permohonan Nomor 2/PUU-XII/2014 (para Pemohon II) dalam satu putusan, karena kedua permohonan tersebut diregistrasi pada hari yang sama, memiliki substansi yang sama, dan dalil-dalil serta pembuktiannya saling berkaitan;

Menimbang bahwa Mahkamah perlu segera memutus perkara a quo karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga perlu segera ada kepastian hukum bagi lembaga negara yang berwenang mengajukan

calon hakim konstitusi dalam hal ini DPR untuk segera menjalankan kewenangannya dalam memilih dan menentukan dua orang hakim konstitusi yang keduanya diajukan oleh DPR. Apabila putusan dalam perkara ini ditunda, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengisian dua Hakim Konstitusi yang lowong tersebut. Ketidakpastian pengisian dua Hakim Konstitusi tersebut, akan menghambat Mahkamah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu Tahun 2014. Bahkan dapat dipastikan dalam waktu dekat, Hakim Konstitusi hanya tersisa tujuh orang dan apabila salah seorang saja di antaranya berhalangan maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU MK tidak dapat memutus perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan serta analisis skripsi diatas yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilakukan oleh internal dalam tubuh organisasi MK, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dalam organisasi yakni Komisi Yudisial sebagai wadah diluar organisasi, dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan. Melihat mekanisme pengawasan dari prespektif normatif dalam UU No. 4 Tahun 2014 untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-

Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut. Mekanisme pengawasan MKHK dari prespektif normatif dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK Menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Etik, apakah memang benar pelanggaran itu dilakukan. Lantas kemudian Dewan Etik mengusulkan pembentukan MKHK untuk menyelenggarakan persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terduga atau terlapor melakukan pelanggaran.

2. Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada di bawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol eksternal masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan (*al-muraqabah*), seperti lembaga

Qadi al-Qudat yang bersifat preventif dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qadi* oleh khalifah. Jalannya organisasi MK akan terhindar dari munculnya penyimpangan-penyimpangan dengan peraturan yang merugikan MK. Dengan adanya mekanisme sistem internal dan eksternal yang berjalan baik membuat setiap indikasi terjadinya penyimpangan akan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka akan dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk memelihara kemaslahatan serta menanggulinya agar tidak bergulir menjadi penyimpangan sekaligus menghindari *mafsad at* (madarat) yang lebih besar dan luas. Selain itu mekanisme sistem internal dan eksternal bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi MK sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan.

B. SARAN

1. Saran ditujukan kepada pemerintah

Setelah putusan MK maka MK dan seluruh jajarannya wajib menaati peraturan dan menjaga kode etik yang telah ditentukan. Hal ini untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilakukan oleh internal dalam tubuh organisasi MK, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dalam

organisasi yakni Komisi Yudisial sebagai wadah diluar organisasi, dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan. Melihat mekanisme pengawasan dari prespektif normatif dalam UU No. 4 Tahun 2014 untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

2. Saran ditujukan kepada masyarakat

Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum mengerti arti dari Mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibataalkannya UU tersebut. Mekanisme pengawasan MKHK dari prespektif normatif dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK Menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Etik, apakah memang benar pelanggaran itu dilakukan. Oleh sebab itu penulis beranggapan harus adanya pemberian pemahan kepada

masyarakat Indonesia terhadap akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut..



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Nana Herdiana.2013. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV PustakaSetia.
- Arto H. A. Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddiqi Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera.
- Bisri Cik Hasan, 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda Karya
- Gaffar Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harahap Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Huda Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kawo Yosef Rifu, *Analisa Pemerintahan Pusatdan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mahkamah Konstitusi. 2004. Cetak Biru: *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Manan Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mawardi Imam.2000. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- MD Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarata: LP3ES.
- Miswanto Reka. 2017. *Kamus Pintar Perkuliahan*. Surabaya: Gemilang.
- Muhammad Abdul Kadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Partanto Pius dan Dahlan Al Barry.2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prang Amrizal J. 2011. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

- Rasjid Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.4 Tahun 2014 tentang MK.
- Rosyada Dede. 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Salim Peter. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.
- Sani Abdullah, 1997. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sinn Abu, Ahmad Ibrahim. 2012. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardja Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunindhia Y. W. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Rineka Cipta*. Jakarta.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tjandra W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Triatmodjo Sudibyo. 2000. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tutik Titik Triwulan, 2010. *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang tentang Dewan Etik.
- Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang tentang Peradilan Agama
- Usfunan Yohanes. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.